
PERAN DINAS PERTANIAN DALAM UPAYA PENGENDALIAN INFLASI CABAI

THE ROLE OF THE AGRICULTURE AGENCY IN EFFORTS TO CONTROL CHILI INFLATION

¹**Nursanti**

Program Magister Manajemen, Universitas Fajar, Makassar

nursanti8888@gmail.com

²✉**Nurmadhani Fitri Suyuthi**

Universitas Fajar, Makassar

nurmadhanifitrisuyuthi29@gmail.com

³**Abdul Majid Bakri**

Universitas Fajar, Makassar

abdulmajid.bakri@unifa.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the managerial role of Dinas Pertanian of Penajam Paser Utara Regency in efforts to control chili inflation in Penajam District and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. Controlling chili inflation is an important effort to maintain food price stability and ensure the availability of chili commodities for the community. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), farmer groups, and chili farmers. Data were analyzed using which includes the functions of planning, organizing, actuating and controlling. The results indicate that Dinas Pertanian of Penajam Paser Utara Regency has implemented management functions in controlling chili inflation effectively through various programs aimed at increasing production and stabilizing chili supply. The obstacles encountered include extreme weather conditions, pest and plant disease outbreaks, high production costs, fluctuations in chili prices, and dependence on supplies from outside the region. Meanwhile, the supporting factors include support from local government programs, the active role of Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), active farmer groups, support from Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), and the growing potential of local chili production.

Keywords: *Role of Agricultural Service, Chili Inflation Control, Food Price Stability.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajerial Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya pengendalian inflasi cabai di Kecamatan Penajam serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaannya. Pengendalian inflasi cabai merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaan cabai bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), kelompok tani, dan petani cabai. Analisis data meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara telah menjalankan fungsi manajemen dalam pengendalian inflasi cabai dengan cukup baik melalui berbagai program peningkatan produksi dan stabilisasi pasokan cabai. Hambatan yang dihadapi meliputi cuaca ekstrem, serangan hama dan penyakit tanaman, tingginya biaya produksi, fluktuasi harga cabai, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah. Adapun faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah daerah, peran aktif Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), kelompok tani yang aktif, dukungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta potensi produksi cabai lokal yang terus berkembang.

Kata kunci: Peran Dinas Pertanian, Pengendalian Inflasi Cabai, Stabilitas Harga Pangan.



PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai stabilitas ekonomi suatu daerah. Secara konseptual, inflasi pertama kali dijelaskan secara sistematis oleh Irving Fisher (1911) melalui *Quantity Theory of Money* yang menyatakan bahwa kenaikan jumlah uang beredar akan mendorong peningkatan tingkat harga secara umum. Selanjutnya, Keynes (1936) menambahkan bahwa inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh uang beredar, tetapi juga oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat. Inflasi daerah sangat dipengaruhi oleh kelompok volatile food, khususnya komoditas hortikultura seperti cabai. Cabai menjadi salah satu komoditas yang paling sering memicu lonjakan inflasi karena permintaannya relatif stabil, sementara pasokannya mudah terganggu oleh perubahan cuaca dan kegagalan panen.

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu wilayah penyangga pangan di Provinsi Kalimantan Timur juga menghadapi permasalahan fluktuasi harga cabai. Ketika terjadi gangguan produksi atau distribusi, harga cabai di pasar lokal meningkat secara signifikan dan berkontribusi terhadap inflasi daerah. Kondisi ini menuntut peran aktif pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian, dalam melakukan pengendalian inflasi melalui kebijakan produksi, pengelolaan distribusi, serta koordinasi lintas sektor. Pengendalian inflasi cabai tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut ketepatan perencanaan tanam, ketersediaan sarana produksi, sistem informasi harga, serta koordinasi antara petani, pedagang, dan pemerintah daerah. Tanpa manajemen yang terencana dan terkoordinasi dengan baik, kebijakan pengendalian inflasi cenderung bersifat reaktif dan kurang efektif.

Dalam pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat kesenjangan yang signifikan antara potensi yang dimiliki dan realisasi pertumbuhannya. Meskipun sektor pertanian telah diakui sebagai salah satu tulang punggung perekonomian, terutama dengan perannya sebagai penyedia pangan nasional dan kontributor besar terhadap PDB, kenyataannya sektor ini masih sering kali tidak diprioritaskan dalam kebijakan pembangunan daerah. Hal ini menyebabkan sektor pertanian tidak mampu berkembang secara optimal, bahkan di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan tuntutan pertumbuhan ekonomi hijau.

Selain itu, perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser Utara meningkatkan kebutuhan pangan, sementara kesiapan daerah sebagai penyangga pangan masih menghadapi berbagai tantangan. Pengelolaan sektor produksi (*on-farm*) dan pascapanen (*off-farm*) yang belum terintegrasi menyebabkan ketidakstabilan harga saat terjadi over produksi, sehingga kesejahteraan petani belum meningkat secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pembangunan pertanian yang lebih terpadu dan adaptif sebagaimana diidentifikasi dalam, (Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2024–2026). Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti pemanfaatan lahan yang belum optimal, rendahnya produktivitas, keterbatasan infrastruktur pertanian, alih fungsi lahan, serta dampak perubahan iklim. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas pelayanan Dinas Pertanian dan berpotensi mengganggu stabilitas produksi serta harga komoditas pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas intervensi dinas pertanian kabupaten penajam paser utara dalam mendukung petani cabai dan inflasi cabai, dengan fokus pada pemberian pelatihan, menjalankan program-program yang mendukung penanganan inflasi cabai, akses permodalan, pengembangan infrastruktur yang diperlukan, serta strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Evaluasi terhadap kebijakan dan strategi dinas pertanian ini penting untuk memahami bagaimana intervensi yang dilakukan dalam penanganan inflasi cabai, meningkatkan produktivitas cabai dan pengelolaan lahan.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi perbaikan pelayanan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani cabai mengenai peran dinas pertanian dalam mengatasi inflasi cabai di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. penanganan inflasi cabai memerlukan peran aktif pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai dukungan, baik berupa kebijakan, infrastruktur, maupun program-program pengembangan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani, seperti akses terhadap teknologi pertanian, permodalan, pelatihan, dan pasar.

Efektivitas peran pemerintah daerah sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sumber daya yang tersedia, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara, berkontribusi dalam pemberdayaan petani cabai dan sejauh mana kebijakan dan program yang ada dapat memenuhi kebutuhan dan harapan petani.

Rata-rata Harga Komoditas Cabai Per Tahun (2023 - 2025)



Gambar 1. Rata-Rata Harga Komoditas Cabai Per Tahun (2023-2025)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Cabai Rawit Hijau secara konsisten menjadi komoditas dengan rata-rata harga tertinggi di setiap tahunnya, mencapai puncaknya di tahun 2024 sebesar Rp 68.333. Secara keseluruhan, seluruh jenis komoditas cabai mengalami lonjakan harga tertinggi pada tahun 2024 sebelum kembali melandai atau turun di tahun 2025.

Berdasarkan perkembangan harga cabai selama tiga tahun terakhir, terlihat bahwa Cabai Rawit Hijau secara konsisten menjadi komoditas dengan rata-rata harga tertinggi setiap tahunnya, dengan puncak harga terjadi pada tahun 2024 yang

mencapai Rp68.333. Selain itu, seluruh jenis komoditas cabai menunjukkan pola yang serupa, yaitu mengalami kenaikan harga yang signifikan pada tahun 2024 sebelum kembali melandai pada tahun 2025. Fenomena ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga cabai tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi produksi di tingkat petani.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya harga cabai selama periode tersebut adalah kondisi cuaca yang tidak menentu. Perubahan pola curah hujan, musim kemarau yang lebih panjang, maupun hujan dengan intensitas tinggi pada waktu yang tidak biasa menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman cabai. Kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan berbagai hama dan penyakit tanaman, seperti serangan antraknosa, layu bakteri, maupun hama pengisap, yang mengakibatkan penurunan produktivitas bahkan gagal panen di beberapa sentra produksi. Berkurangnya pasokan cabai di pasar sebagai akibat dari menurunnya hasil panen kemudian mendorong kenaikan harga yang cukup tajam, terutama pada tahun 2024. Memasuki tahun 2025, kondisi produksi mulai membaik seiring dengan cuaca yang relatif lebih kondusif di beberapa wilayah sentra produksi serta meningkatnya luas panen. Peningkatan pasokan ini menyebabkan harga cabai kembali mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih berfluktuasi mengikuti kondisi pasar.

Di sisi lain, struktur tata niaga cabai juga turut memengaruhi dinamika harga. Pada tingkat petani, keberadaan tengkulak atau pedagang pengumpul sering kali menyebabkan posisi tawar petani menjadi lemah. Keterbatasan akses terhadap informasi harga, minimnya fasilitas penyimpanan, serta kebutuhan petani untuk segera menjual hasil panen membuat mereka cenderung menerima harga yang ditetapkan oleh tengkulak, yang umumnya lebih rendah dibandingkan harga pasar. Sementara itu, ketika pasokan di pasar menurun akibat gangguan produksi, harga di tingkat konsumen dapat meningkat secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga di pasar tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan yang sebanding bagi petani, karena sebagian keuntungan masih dinikmati oleh pelaku distribusi. Oleh karena itu, fluktuasi harga cabai dalam tiga tahun terakhir merupakan hasil interaksi antara faktor iklim, gangguan organisme pengganggu tanaman, penurunan produksi, serta sistem pemasaran yang belum sepenuhnya memberikan posisi tawar yang kuat bagi petani.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi cabai tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga memerlukan perencanaan yang tepat, koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas petani, serta keberlanjutan program pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara berkontribusi dalam pemberdayaan petani cabai serta sejauh mana kebijakan dan program yang telah dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan petani sekaligus mendukung stabilitas harga cabai di Kecamatan Penajam.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Dinas Pertanian dalam upaya pengendalian inflasi cabai di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan fokus pada kebijakan dan

program yang telah diimplementasikan serta dampaknya terhadap peningkatan produksi, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Dinas Pertanian dan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan dan program pengendalian inflasi cabai secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto dalam jurnal yang ditulis Lantaeda et al., (2017) peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Pendapat ini menjelaskan bahwa peran muncul karena adanya status atau posisi yang dimiliki seseorang dalam lingkungan sosial. Tanpa pelaksanaan hak dan kewajiban, suatu kedudukan belum dapat dikatakan memiliki peran yang nyata. Peran memiliki fungsi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan tujuan organisasi. Fungsi peran antara lain Sebagai Pedoman Perilaku Sesuai Kedudukan, Sebagai Alat Koordinasi Dalam Organisasi, Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Terhadap Tugas, Sebagai Sarana Mencapai Tujuan Organisasi, Sebagai Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam pemerintahan, fungsi peran sangat penting untuk memastikan pelayanan dan program dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. Inflasi

Inflasi adalah proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun sehingga daya beli masyarakat menjadi berkurang. Dengan kata lain, jumlah uang yang sama tidak lagi dapat membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Menurut beberapa ahli ekonomi, inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Selain itu, inflasi juga dapat disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat maupun naiknya biaya produksi. Inflasi juga dapat dibedakan berdasarkan asalnya, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri (*imported inflation*). Inflasi dari luar negeri biasanya terjadi karena kenaikan harga barang impor atau melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sehingga harga barang impor menjadi lebih mahal.

3. Pengendalian Inflasi

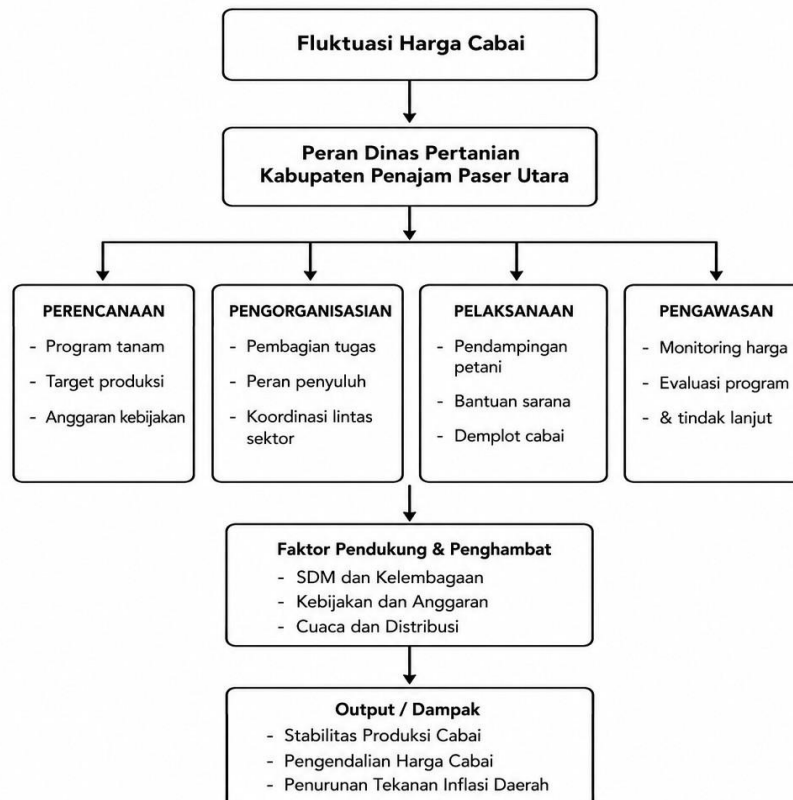
Pengendalian inflasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga terkait untuk menjaga kenaikan harga barang dan jasa agar tetap stabil dan tidak meningkat secara berlebihan. Yunita dan Jamaludin (2024) menjelaskan bahwa pengendalian inflasi memerlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar harga barang, terutama bahan pangan, tetap stabil dan terjangkau. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan motivator dalam menjaga kestabilan harga dan meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Pengendalian inflasi juga dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah agar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat dapat berjalan dengan baik. Jika harga barang terlalu tinggi dan tidak terkendali, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah biasanya melakukan berbagai upaya seperti operasi pasar, pasar murah, menjaga stok pangan, memperbaiki distribusi barang, serta meningkatkan

produksi pertanian agar inflasi tetap terkendali dan harga kebutuhan pokok tetap stabil.

4. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan bahwa pengendalian inflasi cabai sebagai variabel utama akan mempengaruhi stabilitas harga cabai, yang pada akhirnya berdampak pada pengendalian inflasi daerah.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam proses manajerial Dinas Pertanian dalam pengendalian inflasi di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 2 bulan, yaitu dari Maret sampai April 2026, yang meliputi tahapan persiapan penelitian, pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sekitar 9-12 orang. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), petani cabai, serta pedagang cabai, diperoleh hasil bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas produksi dan harga cabai di Kecamatan Penajam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian inflasi cabai dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan program, pengawasan distribusi dan harga, serta evaluasi program.

1. Peran Manajerial Dinas Pertanian dalam Upaya Pengendalian Inflasi Cabai

Peran perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya pengendalian inflasi cabai di Kecamatan Penajam terlihat dari penyusunan berbagai program strategis yang difokuskan pada peningkatan produksi cabai lokal, penguatan ketahanan pangan masyarakat, serta menjaga kestabilan pasokan dan harga cabai di pasar. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ir. Andi Trasodiharto, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian dan Gunawan, S.P selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, diketahui bahwa Dinas Pertanian memiliki program hortikultura yang diarahkan pada peningkatan luas tanam cabai, bantuan sarana produksi pertanian, penguatan pola tanam, serta pendampingan kelompok tani di Kecamatan Penajam. Terkait program ini, Ir. Andi Trasodiharto, M.Si menjelaskan bahwa:

"Pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mulsa dilakukan untuk membantu petani meningkatkan hasil produksi cabai sehingga ketersediaan cabai tetap terjaga." (Wawancara langsung, 12 Maret 2026)

Perencanaan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga di Kecamatan Penajam secara komprehensif melalui koordinasi lintas sektor bersama TPID.

Dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi cabai, Dinas Pertanian melibatkan beberapa unsur penting, yaitu Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), hingga koordinasi lintas sektor bersama TPID Kabupaten Penajam Paser Utara. Setiap unsur memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai bidangnya. Kepala Dinas Pertanian berperan dalam penyusunan kebijakan, koordinasi program, serta pengambilan keputusan strategis terkait pengendalian inflasi cabai. Mengenai pengorganisasian lintas sektor ini, Ir. Andi Trasodiharto, M.Si menjelaskan bahwa:

"Koordinasi dengan TPID dilakukan secara rutin untuk memantau harga cabai di pasar serta menjaga kestabilan pasokan cabai di masyarakat." (Wawancara langsung, 12 Maret 2026)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian inflasi cabai dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan program, pengawasan distribusi dan harga, serta evaluasi program. Sinergi antarunsur ini dibentuk agar seluruh program pengendalian inflasi cabai dapat berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam aspek pelaksanaan (*actuating*), Dinas Pertanian menjalankan berbagai program dan kegiatan secara langsung di lapangan yang difokuskan pada penguatan produksi cabai lokal sebagai langkah utama menjaga stabilitas harga pangan di

daerah. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah melalui pemberian bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani cabai di Kecamatan Penajam, di mana Ir. Andi Trasodiharto, M.Si menjelaskan bahwa:

"Pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mulsa dilakukan untuk membantu petani meningkatkan hasil produksi cabai sehingga ketersediaan cabai tetap terjaga." (Wawancara Langsung, 12 Maret 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan (*actuating*) Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengendalian inflasi cabai dilakukan melalui berbagai kegiatan nyata di lapangan, yaitu pemberian bantuan sarana produksi, pendampingan teknis petani, pengaturan pola tanam, penggunaan teknologi pertanian, penguatan kelompok tani, pemantauan distribusi cabai, serta pelaksanaan Pasar Tani dan Gerakan Pangan Murah.

Dalam aspek pengawasan (*controlling*), Dinas Pertanian memiliki peran penting dalam melakukan monitoring terhadap seluruh proses pengendalian inflasi cabai mulai dari produksi, distribusi, pola tanam, kondisi pasar, hingga perkembangan harga di masyarakat. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh melalui pemantauan harga harian di pasar, monitoring lapangan oleh penyuluh pertanian, serta pengawasan terhadap distribusi dari petani hingga ke pasar lokal. Terkait aspek pengawasan makro, Ir. Andi Trasodiharto, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara menjelaskan bahwa:

"Koordinasi dengan TPID terus dilakukan untuk memantau kondisi harga cabai dan memastikan pasokan cabai di masyarakat tetap tersedia." (Wawancara Langsung, 12 Maret 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa fungsi pengawasan (*controlling*) Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengawasan produksi, pola tanam, kondisi tanaman, serangan hama, distribusi pasar, hingga perkembangan harga cabai di masyarakat. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan TPID, monitoring lapangan oleh penyuluh pertanian, pemantauan distribusi dan harga pasar, serta pelaksanaan pasar tani dan Gelar Pangan Murah sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga cabai.

2. Hambatan dan Faktor Pendukung Dinas Pertanian dalam Pengendalian Inflasi Cabai serta Strategi Penanganannya

a. Hambatan Dinas Pertanian dalam Pengendalian Inflasi Cabai

Berdasarkan hasil wawancara penelitian bersama Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pedagang cabai, serta petani cabai di Kecamatan Penajam, diperoleh hasil bahwa terdapat berbagai hambatan yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya pengendalian inflasi cabai. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor produksi pertanian, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca, distribusi pasar, biaya produksi, fluktuasi harga, hingga perilaku petani dan kondisi rantai pemasaran cabai di daerah. Hambatan-hambatan tersebut secara langsung memengaruhi kestabilan produksi dan harga cabai di Kecamatan Penajam sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga inflasi pangan tetap terkendali.

Hambatan utama yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dipengaruhi oleh faktor teknis pertanian dan kondisi alam yang tidak menentu. Perubahan cuaca ekstrem seperti curah hujan tinggi memicu penyakit

tanaman (jamur, busuk batang, patek, antraknosa), sedangkan kemarau panjang memicu kerontokan bunga tanaman. Hal ini diperparah oleh serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen secara signifikan. ST. Hasniwati, S.P selaku Penyuluh Pertanian Lapangan menjelaskan bahwa:

"Kendala utama petani biasanya serangan hama, cuaca yang tidak menentu, dan harga pupuk yang cukup mahal." (Wawancara Langsung, 1 April 2026)

Kondisi iklim dan OPT yang tidak stabil ini secara langsung menghambat produktivitas cabai lokal serta mengganggu stabilitas pasokan pasar. Dengan adanya pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan, Dinas Pertanian diharapkan mampu menjaga keberlangsungan produksi cabai lokal sebagai salah satu langkah strategis dalam pengendalian inflasi pangan di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hambatan lain yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengendalian inflasi cabai adalah serangan hama dan penyakit tanaman. Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) seperti patek, antraknosa, virus kuning, kutu kebul, serta jamur menjadi salah satu penyebab utama menurunnya produksi cabai di Kecamatan Penajam. Serangan hama dan penyakit tersebut dapat menyebabkan kerusakan tanaman, penurunan kualitas hasil panen, bahkan gagal panen apabila tidak segera ditangani dengan baik. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Dinas Pertanian karena penurunan produksi cabai secara langsung memengaruhi kestabilan pasokan dan harga cabai di pasar. Gunawan, S.P selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menjelaskan bahwa:

"Cuaca yang tidak menentu, serangan hama, dan tingginya biaya produksi menjadi kendala utama petani cabai dalam menjaga stabilitas produksi." (Wawancara Langsung, 12 Maret 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa serangan hama dan penyakit tanaman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kestabilan produksi cabai di Kecamatan Penajam. Penyakit seperti patek dan antraknosa sering menyerang buah cabai ketika kelembaban udara meningkat akibat curah hujan tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan buah cabai membusuk sebelum dipanen sehingga kualitas hasil panen menurun dan hasil produksi tidak dapat dipasarkan secara maksimal. Akibatnya, jumlah cabai yang tersedia di pasar menjadi berkurang dan harga cabai cenderung mengalami kenaikan.

Hambatan lain yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya pengendalian inflasi cabai adalah tingginya biaya produksi pertanian yang harus ditanggung petani cabai di Kecamatan Penajam. Tingginya biaya produksi tersebut meliputi harga pupuk non-subsidi, pestisida, mulsa, benih, biaya perawatan tanaman, hingga biaya tenaga kerja panen yang terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menyebabkan petani membutuhkan modal yang cukup besar dalam melakukan budidaya cabai sehingga ketika harga cabai mengalami penurunan, petani berisiko mengalami kerugian yang cukup besar. ST. Hasniwati, S.P selaku Penyuluh Pertanian Lapangan menjelaskan bahwa:

"Kendala utama petani biasanya serangan hama, cuaca yang tidak menentu, dan harga pupuk yang cukup mahal." (Wawancara Langsung, 1 April 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga sarana produksi pertanian menjadi salah satu hambatan utama dalam menjaga keberlanjutan produksi cabai di Kecamatan Penajam. Petani cabai membutuhkan pupuk dan

pestisida dalam jumlah cukup besar agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan terhindar dari serangan hama maupun penyakit. Namun tingginya harga pupuk dan pestisida menyebabkan biaya budidaya cabai semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Hambatan lain yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya pengendalian inflasi cabai adalah fluktuasi harga cabai yang sangat tidak stabil. Harga cabai di Kecamatan Penajam dapat mengalami perubahan secara drastis dalam waktu singkat tergantung pada kondisi produksi, jumlah pasokan, distribusi pasar, serta permintaan masyarakat. Ketidakstabilan harga tersebut menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kestabilan inflasi pangan di daerah karena cabai merupakan salah satu komoditas yang sangat sensitif terhadap perubahan pasokan dan permintaan pasar. Nurbayah, A.Md selaku Penyuluh Pertanian Lapangan menjelaskan bahwa:

"Memang ada petani yang kapok menanam cabai karena harga sering naik turun, tapi kami tetap memberikan motivasi supaya petani tetap menanam."
(Wawancara Langsung, 1 April 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga cabai sangat memengaruhi psikologis dan keputusan petani dalam melakukan budidaya cabai. Ketika harga cabai tinggi, banyak petani tertarik menanam cabai secara bersamaan karena berharap memperoleh keuntungan besar. Namun kondisi tersebut justru menyebabkan produksi cabai meningkat secara bersamaan beberapa bulan kemudian sehingga pasokan di pasar menjadi melimpah dan harga cabai turun drastis. Siklus tersebut terus berulang dan menyebabkan kestabilan harga cabai sulit dikendalikan.

Hambatan lain yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya pengendalian inflasi cabai adalah masih tingginya ketergantungan terhadap pasokan cabai dari luar daerah. Meskipun produksi cabai lokal di Kecamatan Penajam terus ditingkatkan, kebutuhan cabai masyarakat masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh hasil produksi petani lokal sehingga pasokan cabai dari luar daerah seperti Sulawesi, Palu, dan Jawa masih sangat dibutuhkan, terutama ketika produksi lokal mengalami penurunan akibat cuaca buruk, serangan hama, maupun gagal panen. Maria selaku pedagang cabai bahwa:

"Kalau biaya angkut naik atau kapal terlambat karena cuaca buruk, harga cabai biasanya ikut naik karena stok terlambat masuk." (Wawancara Langsung, 31 Maret 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan harga cabai di Kecamatan Penajam. Ketika distribusi cabai dari luar daerah terganggu akibat cuaca buruk, keterlambatan kapal, atau kenaikan biaya transportasi, stok cabai di pasar lokal menjadi terbatas sehingga harga cabai langsung mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab sulitnya menjaga kestabilan harga cabai di masyarakat.

b. Faktor Pendukung Dinas Pertanian

Salah satu faktor pendukung utama dalam pengendalian inflasi cabai di Kecamatan Penajam adalah adanya dukungan program pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program peningkatan produksi hortikultura seperti bantuan benih, pupuk, pestisida, mulsa, pendampingan kelompok tani, penguatan produksi cabai lokal, hingga pelaksanaan program Gerakan Tanam Cabai di masyarakat.

Program- program tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan produksi cabai sekaligus mengendalikan inflasi pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Gunawan, S.P selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura bahwa:

"Bantuan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan mulsa diberikan kepada petani cabai untuk mendukung peningkatan produksi dan menjaga ketersediaan cabai di masyarakat." (Wawancara Langsung, 12 Maret 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dukungan program pemerintah daerah menjadi faktor pendukung utama dalam pengendalian inflasi cabai di Kecamatan Penajam. Dukungan tersebut diwujudkan melalui bantuan sarana produksi, peningkatan luas tanam cabai, program Gerakan Tanam Cabai, pasar tani, Gelar Pangan Murah, serta pendampingan teknis kepada petani melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Program- program tersebut membantu meningkatkan produksi cabai lokal, menjaga kestabilan pasokan cabai di pasar, mengurangi beban biaya produksi petani, serta membantu masyarakat memperoleh cabai dengan harga yang lebih stabil.

Salah satu faktor pendukung penting dalam pengendalian inflasi cabai di Kecamatan Penajam adalah peran aktif Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam melakukan pendampingan teknis kepada petani cabai. Penyuluh pertanian memiliki peran sebagai penghubung antara program Dinas Pertanian dengan petani di lapangan sehingga berbagai kebijakan dan program pengendalian inflasi cabai dapat diterapkan secara langsung kepada kelompok tani. Melalui pendampingan yang dilakukan secara rutin, penyuluh pertanian membantu petani meningkatkan produksi cabai, mengatasi berbagai kendala budidaya, serta menjaga kestabilan pasokan cabai di pasar. ST. Hasniwati, S.P menjelaskan bahwa:

"Petani diarahkan mengatur pola tanam supaya panen tidak serentak sehingga harga cabai tidak jatuh ketika produksi melimpah." (Wawancara Langsung, 1 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam pengendalian inflasi cabai di Kecamatan Penajam. Penyuluh pertanian tidak hanya berperan dalam memberikan pendampingan teknis kepada petani, tetapi juga membantu menjaga kestabilan produksi, mengendalikan serangan hama dan penyakit tanaman, mengatur pola tanam, memotivasi petani, serta memperkuat kelembagaan kelompok tani. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, produksi cabai lokal diharapkan dapat terus meningkat sehingga kestabilan harga cabai di pasar dapat terjaga dan inflasi pangan daerah dapat dikendalikan dengan lebih baik.

Salah satu faktor pendukung penting dalam upaya pengendalian inflasi cabai di Kecamatan Penajam adalah keberadaan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang aktif dalam mendukung pelaksanaan program Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara. Gunawan, S.P selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menjelaskan bahwa:

"Dinas Pertanian terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani cabai melalui bantuan sarana produksi dan pengawasan pola tanam." (Wawancara Langsung, 12 Maret 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kelompok tani menjadi mitra utama

Dinas Pertanian dalam menjalankan berbagai program peningkatan produksi cabai di Kecamatan Penajam. Melalui kelompok tani, pemerintah daerah lebih mudah melakukan pendataan petani, penyaluran bantuan, pengawasan pola tanam, serta monitoring kondisi produksi cabai di lapangan. Dalam hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa kelompok tani memiliki peran penting dalam menjaga motivasi petani agar tetap menanam cabai meskipun harga cabai sering mengalami fluktuasi. Melalui kerja sama kelompok, petani merasa lebih mendapatkan dukungan dan pendampingan sehingga lebih percaya diri dalam mempertahankan budidaya cabai sebagai komoditas unggulan daerah.

Salah satu faktor pendukung penting dalam upaya pengendalian inflasi cabai di Kecamatan Penajam adalah adanya dukungan dan koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Penajam Paser Utara. TPID memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah melakukan pengawasan harga pangan, pemantauan distribusi cabai, serta pengambilan langkah strategis ketika terjadi kenaikan harga cabai di masyarakat. Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, pengendalian inflasi cabai dapat dilakukan secara lebih cepat, terarah, dan terintegrasi antara pemerintah daerah, Dinas Pertanian, pasar, dan pelaku distribusi pangan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian bersama Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, diperoleh hasil bahwa koordinasi dengan TPID dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan harga cabai, kondisi produksi di lapangan, serta kebutuhan pasokan cabai masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara. Ir. Andi Trasodiharto, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara menjelaskan bahwa:

"Koordinasi dengan TPID terus dilakukan untuk memantau kondisi harga cabai dan memastikan pasokan cabai di masyarakat tetap tersedia." (Wawancara Langsung, 12 Maret 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dukungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam pengendalian inflasi cabai di Kecamatan Penajam. Dukungan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, pemantauan harga pasar, monitoring distribusi dan produksi cabai, pelaksanaan pasar tani dan Gelar Pangan Murah, serta deteksi dini terhadap potensi kenaikan harga pangan. Dengan adanya dukungan TPID, langkah pengendalian inflasi cabai dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi sehingga kestabilan harga cabai di masyarakat dapat tetap terjaga.

Salah satu faktor pendukung penting dalam pengendalian inflasi cabai di Kecamatan Penajam adalah besarnya potensi produksi cabai lokal yang dimiliki Kabupaten Penajam Paser Utara. Kecamatan Penajam memiliki kondisi lahan pertanian yang cukup luas dan potensial untuk pengembangan komoditas hortikultura, khususnya cabai. Potensi tersebut menjadi modal utama bagi Dinas Pertanian dalam meningkatkan produksi cabai lokal guna menjaga kestabilan pasokan cabai di pasar dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan cabai dari luar daerah. Ir. Andi Trasodiharto, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara menjelaskan bahwa:

"Penajam sebagai daerah penyangga IKN tentu mengalami peningkatan kebutuhan pangan sehingga produksi cabai lokal harus terus ditingkatkan." (Wawancara Langsung, 12 Maret 2026)

Berdasarkan seluruh hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa potensi

produksi lokal menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam pengendalian inflasi cabai di Kecamatan Penajam. Potensi tersebut didukung oleh ketersediaan lahan pertanian, peningkatan luas tanam cabai, penggunaan teknologi pertanian, keberadaan kelompok tani yang aktif, serta pendampingan dari Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Dengan peningkatan produksi cabai lokal secara berkelanjutan, kebutuhan cabai masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat lebih banyak dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri sehingga kestabilan harga cabai dapat terjaga dan inflasi pangan daerah dapat dikendalikan dengan lebih baik.

Pembahasan

1. Peran Manajerial Dinas Pertanian dalam Upaya Pengendalian Inflasi Cabai

Peran manajerial Dinas Pertanian dalam upaya pengendalian inflasi cabai sangat penting karena cabai termasuk komoditas pangan yang sering mengalami fluktuasi harga. Kenaikan harga cabai biasanya dipengaruhi oleh faktor cuaca, gagal panen, serangan hama, distribusi yang terganggu, serta tingginya permintaan pasar pada waktu tertentu. Kondisi ini dapat memicu inflasi daerah karena cabai merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang banyak dikonsumsi sehari – hari. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pertanian menerapkan fungsi- fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan guna menjaga kestabilan produksi dan harga cabai.

Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah melaksanakan fungsi perencanaan (*planning*) sebagai langkah antisipatif untuk menekan inflasi daerah yang kerap dipicu oleh komoditas cabai. Merujuk pada teori George R. Terry, langkah ini diwujudkan melalui penyusunan program hortikultura strategis, seperti perluasan areal tanam menggunakan lahan tidur dan pekarangan masyarakat, pemetaan jadwal pola tanam, serta penyaluran bantuan sarana produksi berupa benih unggul dan pupuk. Perencanaan jangka panjang ini difokuskan untuk menggenjot produktivitas lokal guna memutus ketergantungan pasokan cabai dari luar daerah (Jawa dan Sulawesi), yang menjadi sangat krusial mengingat status strategis Kabupaten PPU sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Pendekatan taktis ini sejalan dengan penelitian Riza Pahlevi (2017) mengenai signifikansi sektor pertanian terhadap stabilitas harga bahan pokok.

Pada fungsi pengorganisasian (*organizing*), Dinas Pertanian melakukan pembagian tugas dan pengelompokan kerja secara jelas guna memastikan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran. Struktur koordinasi melibatkan Kepala Dinas sebagai pengambil kebijakan utama, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada lini teknis, serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang mendampingi Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai basis penggerak produksi di lapangan. Lintas sektor juga diperkuat melalui kemitraan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengawal stabilitas pasar. Namun, implementasi pengorganisasian ini masih membentur beberapa kendala riil, seperti keterbatasan jumlah personel PPL, keterlambatan pelaporan data lapangan, serta panjangnya rantai distribusi akibat ketergantungan petani pada tengkulak.

Berdasarkan hasil penelitian, fungsi pelaksanaan (*actuating*) Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengendalian inflasi cabai dilakukan melalui

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan nyata di lapangan yang bertujuan menjaga kestabilan produksi dan harga cabai di Kecamatan Penajam. Pelaksanaan program tersebut meliputi bantuan sarana produksi, pendampingan teknis petani, pengaturan pola tanam, penggunaan teknologi pertanian, hingga pelaksanaan Pasar Tani dan Gerakan Pangan Murah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ida Marina et al. (2021) yang menjelaskan bahwa pengendalian inflasi pangan memerlukan pelaksanaan program yang terintegrasi melalui peningkatan produksi, penguatan distribusi, dan pendampingan petani secara berkelanjutan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan melalui program pertanian yang tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan fungsi pengawasan (controlling) dalam upaya pengendalian inflasi cabai melalui monitoring terhadap produksi, pola tanam, distribusi, serta perkembangan harga cabai di pasar. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan cabai tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta harga cabai di masyarakat tetap stabil. Fungsi pengawasan menjadi sangat penting karena cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sering menjadi penyumbang inflasi daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nazrantika Sunarto et al., (2024) yang menjelaskan bahwa pengendalian inflasi pangan memerlukan pengawasan harga dan pasokan pangan secara rutin melalui koordinasi lintas sektor bersama TPID. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa monitoring harga pangan secara berkala menjadi langkah penting dalam mendeteksi potensi inflasi pangan sejak dini.

2. Hambatan dan Faktor Pendukung dalam Pengendalian Inflasi Cabai

Berdasarkan hasil penelitian, fungsi manajerial Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengendalikan inflasi cabai di Kecamatan Penajam dihadapkan pada hambatan multidimensional yang kompleks. Dalam perspektif teori manajemen George R. Terry, hambatan dalam pelaksanaan manajemen merupakan kondisi eksternal maupun internal yang dapat mengganggu deviasi ketercapaian tujuan organisasi, sehingga memerlukan langkah pengawasan dan evaluasi yang presisi. Di lini hulu, anomali cuaca ekstrem menjadi determinan utama yang mengganggu stabilitas produksi. Curah hujan yang tinggi meningkatkan kelembaban udara yang mengakibatkan tanaman cabai rentan terserang Organisme Pengganggu Tanaman seperti patek, busuk buah, dan antraknosa, sedangkan musim kemarau panjang memicu kerontokan bunga akibat defisit air. Fenomena iklim dan serangan OPT ini secara signifikan menurunkan kuantitas serta kualitas hasil panen (Widasari et al., 2023; Setiani et al., 2019), sekaligus meningkatkan beban ekonomi petani akibat lonjakan biaya operasional untuk pembelian pestisida dan pupuk tambahan (Mursidah et al., 2025).

Kondisi tersebut diperparah oleh fluktuasi harga pasar yang tidak menentu. Ketika terjadi panen raya, harga cabai sering kali anjlok di bawah biaya modal yang mengakibatkan disinsentif bagi petani untuk melanjutkan budidaya pada musim berikutnya (Marina et al., 2021). Di lini hilir, struktur pasokan cabai di Kabupaten PPU masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan antardaerah, seperti dari Sulawesi dan Jawa. Akibatnya, stabilitas harga lokal sangat rentan terhadap gangguan logistik, faktor cuaca jalur laut, dan fluktuasi harga BBM.

Aspek distribusi ini semakin rumit akibat panjangnya rantai pemasaran dan kuatnya dominasi perantara (tengkulak) yang memperlebar disparitas harga antara tingkat petani dan konsumen (Febrianti & Haerah, 2026). Tantangan manajerial ini mengalami eskalasi seiring dengan posisi strategis Kabupaten PPU sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), di mana pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi berdampak langsung pada lonjakan permintaan komoditas cabai di pasar (Mursidah et al., 2025).

Di sisi lain, efektivitas manajerial Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjaga stabilitas komoditas ini didukung kuat oleh sinergi berbagai faktor pendorong. Merujuk pada teori George R. Terry, faktor pendukung dalam manajemen merupakan instrumen akselerasi yang membantu organisasi mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Faktor pendukung utama bersumber dari konsistensi kebijakan pemerintah daerah melalui implementasi program bantuan sarana produksi (benih unggul, pupuk, mulsa) yang mampu menekan biaya input pertanian. Selain itu, optimalisasi ketahanan pangan domestik dilakukan melalui Gerakan Tanam Cabai di lahan pekarangan serta intervensi harga melalui pelaksanaan Pasar Tani dan Gelar Pangan Murah (Febrianti & Haerah, 2026). Pada tataran teknis, keberhasilan program tersebut didorong oleh peran aktif Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertindak sebagai fasilitator dan jembatan kebijakan. PPL secara konsisten memberikan edukasi teknologi mitigasi cuaca, memantau sebaran OPT, serta mengarahkan pengaturan pola tanam terjadwal guna menghindari risiko oversupply yang dapat menjatuhkan harga jual di tingkat produsen (Setiani et al., 2019).

Secara kelembagaan, keberadaan Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang aktif menjadi wadah strategis dalam menjamin distribusi bantuan yang tepat sasaran sekaligus memperkuat posisi tawar (bargaining position) petani terhadap eksploitasi harga oleh tengkulak (Mursidah et al., 2025). Pengawasan pada tingkat makro diperkokoh melalui sinergi lintas sektor bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kemitraan ini memfasilitasi monitoring harga harian sebagai early warning system inflasi daerah serta mempercepat penanganan hambatan logistik pasar (Marina et al., 2021). Faktor pendukung ini diintegrasikan dengan besarnya potensi ketersediaan lahan pertanian di Kecamatan Penajam serta keunggulan komparatif cabai lokal yang memiliki tingkat kesegaran lebih baik sehingga lebih diminati oleh konsumen domestik (Widasari et al., 2023). Kombinasi faktor pendukung ini menciptakan ekosistem manajerial yang komprehensif bagi Dinas Pertanian dalam menekan laju inflasi pangan secara berkelanjutan di daerah penyangga IKN.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa faktor pendukung Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengendalian inflasi cabai berasal dari sinergi antara program pemerintah daerah, peran penyuluh pertanian, kelompok tani yang aktif, dukungan TPID, serta potensi produksi cabai lokal yang terus dikembangkan. Faktor-faktor tersebut menjadi kekuatan utama dalam menjaga kestabilan produksi, distribusi, dan harga cabai di Kecamatan Penajam sehingga upaya pengendalian inflasi pangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen (POAC) dalam upaya pengendalian inflasi cabai di Kecamatan Penajam. Fungsi perencanaan dilaksanakan melalui penyusunan pola tanam, pendataan produksi, serta perencanaan kegiatan pembinaan petani. Fungsi pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas dan koordinasi dengan penyuluh pertanian, kelompok tani, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Fungsi pelaksanaan diwujudkan melalui pendampingan petani, pengembangan demplot, serta penyaluran sarana produksi pertanian. Fungsi pengawasan dilakukan melalui pemantauan produksi dan harga cabai, evaluasi distribusi, serta pelaksanaan langkah stabilisasi harga apabila terjadi gejolak di pasar. Penerapan keempat fungsi manajemen tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pertanian telah berperan aktif dalam menjaga ketersediaan pasokan dan mendukung stabilitas harga cabai di Kecamatan Penajam

Hambatan yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengendalian inflasi cabai meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa keterbatasan anggaran untuk pengembangan budidaya cabai, sehingga pembinaan, pendampingan, dan penyediaan sarana produksi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sementara itu, faktor eksternal meliputi perubahan cuaca ekstrem, serangan hama dan penyakit tanaman, tingginya biaya produksi, fluktuasi harga cabai, serta ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Hambatan tersebut memengaruhi upaya menjaga stabilitas produksi dan harga cabai di Kabupaten Penajam Paser Utara. Faktor pendukung dalam pengendalian inflasi cabai meliputi dukungan program pemerintah daerah, peran aktif penyuluh pertanian, kelompok tani yang aktif, dukungan TPID, serta potensi produksi cabai lokal yang terus dikembangkan. Secara keseluruhan, peran manajerial Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengendalian inflasi cabai telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan penguatan produksi lokal, perbaikan distribusi, dan peningkatan koordinasi lintas sektor agar kestabilan harga cabai dan ketahanan pangan daerah dapat terjaga secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrianti, P., & Haerah, K. (2026). Efektivitas kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam stabilisasi harga komoditas pangan di Kabupaten Bondowoso tahun 2024. *PREDIKSI: Jurnal Administrasi & Kebijakan*, 25(1), 1–10.
- Fisher, I. (1911). *The purchasing power of money*. New York: Macmillan.
- Hesti, D. E. P., Adiansyah, J. S., & Johari, H. I. (2025). *Peran Pemerintah Daerah dan Organisasi Non-Pemerintah dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan*. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 490–502.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. London: Macmillan.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon. 4(48). *E-Journal UNSRAT*
- Marina, I., Andayani, S. A., Dinar, Dani, U., & Sumantri, K. (2021). Pendampingan

- program pengendalian inflasi daerah pada klaster cabai merah. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 775– 779.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Modanggu, I., Kuuna, W., Pambudi, M. R., & Eraku, S. S. (2023). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Wilayah: Studi Kasus di Desa Butu Kecamatan Tilongkabila. *Journal of Geographical Sciences and Education*, 1(2), 79–84.
- Nadilla, N., & Lerdiana, W. (2024). Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) dalam menjaga stabilitas harga cabai di Pasar Bintan Center Kota Tanjungpinang. *Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan*, 3(1), 150–159.
- Pahlevi, R. (2017). Urgensi Bank Indonesia mengendalikan inflasi melalui sektor pertanian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1).
- Pattipeilohy, A. (2024). *Manajemen Pemerintahan: Teori dan Praktik*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Putri, A. R. (2022). Analisis pengendalian inflasi komoditas hortikultura di tingkat kabupaten. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 145–158.
- Rahman, A., & Haryanto, B. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 67–79.
- Setiani, R., Amalia Nugrahapsari, R., Prabawati, S., & Swastika, D. K. S. (2019). Analisis tingkat kepuasan rumah tangga terhadap program gerakan tanam cabai. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 22(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, N., Astuti, D., Enjeli, & Maisyarah, R. (2024). Analisis peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bengkalis. *Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT)*, 416–450.